

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis *ratio legis* tindak pidana tentang izin pertambangan dan *ratio decidendi* putusan hakim atas kasus pidana tentang izin pertambangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder di mana semua bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Pembahasan atas isu hukum penelitian ini yaitu *Ratio legis* tindak pidana tentang izin pertambangan dalam Pasal 165 UU 4/2009 adalah mengantisipasi adanya kecerobohan dan membuat pejabat agar berhati-hati dalam mengeluarkan ijin pertambangan dan minerba. Jika dalam pemberian ijin bertentangan dengan UU 4/2009 dan terdapat penyalahgunaan wewenang, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan. Naskah Akademik UU 3/2020 tidak memberikan pemaparan yang jelas alasan hukum penghapusan Pasal 165 UU 4/2009 meskipun hal tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu pejabat dapat menerbitkan izin pertambangan dan batubara dengan melanggar UU 4/2009 jo UU 3/2020 serta menyalahgunakan wewenangnya tanpa dapat dijatuhi sanksi pidana. Padahal penyalahgunaan wewenang adalah tindakan maladministrasi yang menjadi bagian dari perbuatan melawan hukum. *Ratio decidendi* putusan hakim atas kasus pidana tentang izin pertambangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.144/Pid.B/ 2010/PN.Tgr. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 998 K/Pid.Sus/2011 diputus bersalah melanggar Pasal 165 UU 4/2009 karena terdakwa sebagai Pj Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan perpanjangan IUP dengan melanggar UU 4/2009 karena ketidaklengkapan syarat perpanjangan IUP dan menyalahgunakan wewenangnya karena mengeluarkan perpanjangan IUP secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020, penyalahgunaan wewenang dalam izin pertambangan dan batubara diputus sebagai tindak pidana korupsi karena terdakwa (Gubernur Sulawesi Tenggara) melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan IUP, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dan terdapat kerugian negara. Sehingga jika penerbitan IUP tidak menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ atau korporasi dan tidak merugikan keuangan negara, maka tindakan tersebut tidak dapat diproses menggunakan dasar UU PTPK.

Kata Kunci: Izin, Pertambangan Mineral Batubara, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the statutory ratio of criminal offenses regarding mining permits and the deciding ratio of judges' decisions in criminal cases concerning mining permits. This research is a legal research with a statutory, conceptual, and case approach. Sources of legal materials used are sources of primary legal materials and sources of secondary legal materials in which all legal materials are collected using the literature study method and analyzed by prescriptive methods. The discussion on the legal issue of this research, namely the Ratio legis of criminal acts regarding mining permits in Article 165 of Law 4/2009 is to anticipate carelessness and to make officials to be careful in issuing mining and mineral and coal permits. If the granting of a permit contradicts Law 4/2009 and there is abuse of authority, then criminal sanctions can be imposed. The Academic Text of Law 3/2020 does not provide a clear explanation of the legal reasons for the elimination of Article 165 of Law 4/2009 even though this has legal consequences, namely that officials can issue mining and coal permits by violating Law 4/2009 in conjunction with Law 3/2020 and abuse their authority without being able to subject to criminal sanctions. Whereas abuse of power is an act of maladministration which is part of an act against the law. Decidendi ratio for the judge's decision on criminal cases regarding mining permits in the Tenggara District Court Decision No.144 / Pid.B / 2010 / PN.Tgr. jo. Supreme Court Cassation Decision Number 998 K / Pid.Sus / 2011 was found guilty of violating Article 165 of Law 4/2009 because the defendant as Acting Regent of Kutai Kartanegara issued an IUP extension by violating Law 4/2009 due to incomplete IUP extension requirements and abusing his authority for issuing IUP extensions contrary to the provisions of laws and regulations. Whereas in the Supreme Court Review Decision Number 132 PK / Pid.Sus / 2020, the abuse of authority in mining and coal permits was decided as a criminal act of corruption because the defendant (Governor of Southeast Sulawesi) abused his authority in issuing IUP, benefiting himself or the corporation, and there are state losses. So if the issuance of an IUP does not benefit the self / other person / or the corporation and does not harm the state finances, then the action cannot be processed on the basis of the PTPK Law.

Keywords: Permit, Coal Mineral Mining, Crime

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 144/Pid.B/2010/PN.Tgr Jo
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 998 K/Pid.Sus/2011

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-
TPK/2018/PT.DKI jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 jo Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah dan Selawat untuk Rasulullah atas selesainya penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Agus Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Ketua Tesis ini;
5. Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Dua (MKPT II);
6. Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis ini;
7. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis ini sekaligus selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Satu (MKPT I);
8. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP selaku Anggota Tim Penguji Tesis;
9. Para Bapak dan Ibu dosen, staf, serta civitas akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang turut bersumbangsih atas selesainya tesis ini;
10. Kedua orang tua saya , ayah (alm) Suwanto S.SOS., M.M., M.H., Mama (Alm) Diah rantinem

11. Serta tak lupa ibu Rani Rumiati saya tercinta yang telah merawat saya ketika kecil sampai dewasa, dan membiayai kuliah hingga saat ini.
12. Kakak saya tercinta Suci Nurhayati S.H., Mkn. Yang selalu membantu dan menyemangati penulis.
13. Teman – teman magister hukum Unair Angkatan 2018, 2019,2020
14. Teman – teman pengajian MH Unair
15. Teman – teman advokat : Zubari SH.,MH., Nadiya S.H, Rozi S.H., Rafiqi S.H, Erna S.H., MH, Adam S.H., dll
16. Teman – teman HIMA 2019 : Bagus, indra, elje, April, haikal, dinda. Dll
17. Teman – teman minat peradilan : Dea, Amanda, Niar, Bagus, Zubairi, Indra, Vina, pak fidel, Nurindah, Geralda, David
18. Teman – teman saya : Wening anggraita S.H., Andini reata S.H., Yoga khirarih S.H.,
19. Teman – teman MH Kalem : Jordy Rezandy S.H., Galang surya anggara S.H
20. Teman – teman penulis mulai dari SD, SMP, SMA ,S1 Hingga teman main, yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu. TERIMA KASIH BANYAK.